



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 352111

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : G/ 303 /IV.01/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain dan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Keuangan Negara Terhadap Bendahara;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Kerugian Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
 - f. menyelesaikan kerugian daerah melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
 - g. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; dan
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dibentuk Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang berkedudukan di Inspektorat Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan tugas, administrasi dan inventarisasi kasus Kerugian Daerah serta tugas lain yang diberikan Tim.

KELIMA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang perbulan, terhitung sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022, yang pembayarannya diberikan setiap 6 (enam) bulan, dengan besaran sebagai berikut:

A. Tim

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | : Rp650.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | : Rp600.000,00 |
| 3. Sekretaris | : Rp500.000,00 |
| 4. Anggota | : Rp500.000,00 |

B. Sekretariat Tim

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Ketua | : Rp250.000,00 |
| 2. Wakil Ketua | : Rp250.000,00 |
| 3. Anggota | : Rp220.000,00 |

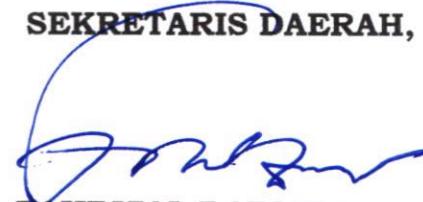
KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Tindaklanjut Penyelesaian dan Pemutakhiran Data Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.2.02.01.04.

KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 - 4 - 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

Tembusan:

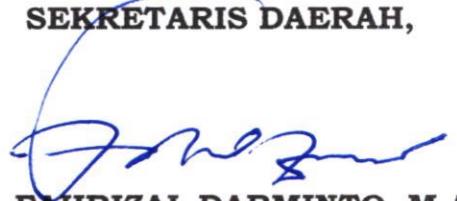
1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 503 /IV.01/HK/2022
TANGGAL : 27 - 4 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung
- III. Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Pembendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 - 2. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

SEKRETARIS DAERAH,

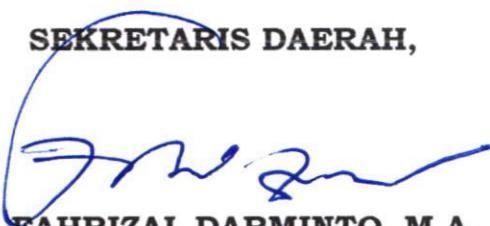

Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : G/ 303/IV.01/HK/2022
TANGGAL : 27 - 4 - 2022

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kepala Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua : Exy Evertiza, SE., MM (Analis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung)
- III. Anggota : 1. M. Efrizal Setiawan, ST., MT (Pengawasan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Muda Inspektur Pembantu Wilayah V Inspektorat Provinsi Lampung)
2. Riasmira, SE., MM (Analis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung)
3. Mahendra Gunadi, S.Spi (Analis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung)
4. Dita Renisa Nawawi, S.Sos., MM (Analis Monitoring dan Evaluasi Inspektorat Provinsi Lampung)
5. Hendri Yoni, Amd (Pengelola Data Inspektorat Provinsi Lampung)

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A
Pembina Utama
NIP. 19641021 199003 1 008